

LAPORAN AKHIR
PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



PELAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
DALAM PEMBERITAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KEPADA STAKEHOLDER DI KALIMANTAN SELATAN

Tahun ke - 1 (satu) dari rencana 1 (satu) tahun

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020
Tanggal 1 April 2020

TIM PENELITI

Dr.Drs.Bachruddin Ali Akhmad,M.Si

(NIDN: 0010125912)

Sarwani, S.Sos, M.Med.Kom

(NIDN:0021057807)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
BAB 4 METODE PENELITIAN	21
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	25
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	76
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Pelayanan Komunikasi Pemerintahan
Dalam Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kepada Stakeholder Di Kalimantan Selatan**

Peneliti

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr.Drs.Bachruddin Ali Akhmad,M.Si
b. NIDN : 0010125912
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Komunikasi
e. Nomor HP : 08125103033
f. Alamat surel (e-mail) : bachruddin.01@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Sarwani,S.Sos,M.Medkom.
b. NIDN : 0021057807
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 (satu) dari rencana 1 (satu) tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp.16..000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp.16..000.000,-

Banjarmasin, 27 November 2020

Ketua,



Mengetahui,
Dekan FISIP

(Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si.)
NIP. 195811181987031004

(Dr.Drs.Bachruddin Ali Akhmad,M.Si.)
NIP. 19591210 1988 111 001



Menyetujui,
Ketua FPPMULM

(Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.)
NIP. 196805071993031020

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan ditengah-tengah masih sedikitnya penelitian mengenai komunikasi pemerintahan pemerintah daerah di negara negara berkembang. Penelitian yang ada cenderung mengkaitkan kinerja dalam bidang ini dengan pemerintah pusat. Kontribusi penelitian ini terkait penggalian praktik komunikasi pemerintahan dalam konteks pemerintah daerah di negara-negara menuju demokratis. Penelitian ini termasuk Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi yang mempunyai tujuan jangka panjang terciptanya teknologi manajemen pemberitaan kebijakan pemda di Kalimantan selatan yang berbasis stakeholder. Target khusus penelitian ini telah berhasil dicapai adalah rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan partisipatif dalam pemberitaan kebijakan pemerintah daerah kepada stakeholdernya yang berbasis stakeholder di Kalimantan Selatan.

Peneliti menggunakan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelayanannya kepada stakeholder sebagai kasus penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kompleksitas faktor layanan komunikasi pemerintahan kepada stakeholder, hasil analisis berbagai dokumen, pengamatan dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan kinerja komunikasi pemerintahan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dari Januari hingga oktober 2020 dikompilasi, dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Kesimpulannya , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik struktural maupun manajemen. Meskipun faktor manajemen tetap penting, dalam kasus Kalimantan Selatan, faktor struktural lebih berpengaruh pada komunikasi pemerintah daerah. Sementara kinerja komunikasi pemerintah daerah belum melibatkan partisipasi aktif dari bawah, lebih berorientasi elit daripada berorientasi publik. Para pejabat pemerintah daerah kurang responsif dan masih *downward communication*, sehingga ide-ide profesionalisasi komunikasi pemerintah daerah masih terbatas pada harapan daripada kenyataan.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa komunikasi pemerintah daerah dapat efektif jika partisipatif, yakni memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan warga negara dalam partisipasi untuk perencanaan kebijakan pemerintah daerah dan implementasinya.

Penelitian ini dilakukan sejalan dengan renstra penelitian ULM, dimana salahsatu unggulannya adalah sumber daya unggul dalam bidang lingkungan lahan basah. Penelitian ini dilakukan pada lembaga pemerintahan, dimana interaksi di antara aparat dan stakeholdernya, secara psikologis dan fisik dipengaruhi oleh lingkungan lahan basah. Karena itu hasil penelitian ini yang berupa rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan ,adalah juga merupakan ilmu komunikasi yang sudah di bumikan atau ilmu komunikasi yang berakar dari lokal.

Kata kunci: Pelayanan, komunikasi pemerintahan; pemerintah daerah,partisipatif, stakeholder, Kalimantan Selatan

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desentralisasi membuka peluang otonomi daerah yang seharusnya membawa angin segar bagi pemerintahan daerah yang baik. Namun praktiknya perilaku pemerintah daerah tidak sesuai dengan prinsip responsif, transparan, akuntabel yang merupakan tujuan dari desentralisasi (Aspinall & Fealy, 2003; Rasyid, 2003). Walaupun praktik-praktik tidak demokratis bukanlah hal baru dalam politik Indonesia, dari sisi optimis, desentralisasi masih menumbuhkan benih harapan. Harapan ini muncul dalam budaya politik baru yang lebih demokratis dan egaliter bahkan ke tingkat desa, sehingga kekuasaan menjadi semakin tersebar dan diperoleh dalam iklim persaingan yang adil. Mekanisme tradisional "Rembug Desa" di sebuah desa di Jawa Barat, misalnya, sebagai ruang musyawarah untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik di desa yang melibatkan para pemimpin desa dan anggota masyarakat dalam posisi yang relatif sama. Iklim ini sangat substansial dan diperlukan ketika demokrasi lokal akan digunakan sebagai dasar untuk tata pemerintahan yang baik dan komunikasi dalam masyarakat (Prasetyo, 2010; Ibrahim, 2020, hal. 140).

Kritik dari media dan para cendekiawan difokuskan pada praktik-praktik pemerintah dan politik lokal di Indonesia, misalnya, praktik korupsi, politik uang dalam pemilihan, dan bahkan praktik kekerasan dan kartelisme dalam kompetisi politik lokal (Choi, 2004; Supriatma, 2009; Hadiz, 2010). Tetapi, pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang pada masa pasca-Soeharto dari catatan demokratisasi dan desentralisasi Indonesia: praktik komunikasi pemerintah yang demokratis dalam lembaga-lembaga politik lokal dan dilembagakan dalam pemerintah daerah di luar Jawa. Selain itu, studi yang cenderung berfokus pada politik di Jawa, khususnya dinamikapolitik nasional di Jakarta. Kecenderungan yang sama dalam beberapa kasus jugatercermin dalam pengembangan studi politik Malaysia (Chernov Hwang, 2010; Noor, 2014; Ghazali, 2019). Studi-studi ini juga menunjukkan keprihatinan sempit dengan komunikasipemerintah daerah dan kelangkaan studi rinci komunikasi pemerintah di Indonesia dan Malaysia.

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desentralisasi membuka peluang otonomi daerah yang seharusnya membawa angin segar bagi pemerintahan daerah yang baik. Namun praktiknya perilaku pemerintah daerah tidak sesuai dengan prinsip responsif, transparan, akuntabel yang merupakan tujuan dari desentralisasi (Aspinall & Fealy, 2003; Rasyid, 2003). Walaupun praktik-praktik tidak demokratis bukanlah hal baru dalam politik Indonesia, dari sisi optimis, desentralisasi masih menumbuhkan benih harapan. Harapan ini muncul dalam budaya politik baru yang lebih demokratis dan egaliter bahkan ke tingkat desa, sehingga kekuasaan menjadi semakin tersebar dan diperoleh dalam iklim persaingan yang adil. Mekanisme tradisional "Rembug Desa" di sebuah desa di Jawa Barat, misalnya, sebagai ruang musyawarah untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik di desa yang melibatkan para pemimpin desa dan anggota masyarakat dalam posisi yang relatif sama. Iklim ini sangat substansial dan diperlukan ketika demokrasi lokal akan digunakan sebagai dasar untuk tata pemerintahan yang baik dan komunikasi dalam masyarakat (Prasetyo, 2010; Ibrahim, 2020, hal. 140).

Kritik dari media dan para cendekiawan difokuskan pada praktik-praktik pemerintah dan politik lokal di Indonesia, misalnya, praktik korupsi, politik uang dalam pemilihan, dan bahkan praktik kekerasan dan kartelisme dalam kompetisi politik lokal (Choi, 2004; Supriatma, 2009; Hadiz, 2010). Tetapi, pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang pada masa pasca-Soeharto dari catatan demokratisasi dan desentralisasi Indonesia: praktik komunikasi pemerintah yang demokratis dalam lembaga-lembaga politik lokal dan dilembagakan dalam pemerintah daerah di luar Jawa. Selain itu, studi yang cenderung berfokus pada politik di Jawa, khususnya dinamikapolitik nasional di Jakarta. Kecenderungan yang sama dalam beberapa kasus jugatercermin dalam pengembangan studi politik Malaysia (Chernov Hwang, 2010; Noor, 2014; Ghazali, 2019). Studi-studi ini juga menunjukkan keprihatinan sempit dengan komunikasipemerintah daerah dan kelangkaan studi rinci komunikasi pemerintah di Indonesia dan Malaysia.

Studi ini terinspirasi oleh tantangan Canel dan Sanders (2003) bahwa meskipun sangat penting bagi politik abad ke-21, studi komunikasi pemerintah adalah bidang studi komunikasi politik yang kurang diteliti. Menurut Canel dan Sander, komunikasi pemerintah "menemukan dirinya dalam semacam tanah tak bertuan teoretis antara komunikasi politik, hubungan masyarakat, dan riset komunikasi organisasi." Bagi pemerintah daerah dalam konteks Indonesia, komunikasi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga negaranya. Seperti yang disarankan Canel dan Sander, "Kualitas pemerintahan penting bagi kesejahteraan manusia. Pemerintahan harus selalu melibatkan pertukaran informasi dan komunikasi tentang kebijakan, ide, dan keputusan antara gubernur dan yang diperintah." (Canel & Sanders, 2003, hlm. 85).

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan pasca lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, mengisyaratkan empat variabel yang harus dijalankan yakni: demokratisasi, pelayanan, pemberdayaan dan transparansi. Dibidang pelayanan muncul fenomena layanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemerintah daerah pemerintah provinsi Kalimantan Selatan kepada stakeholdernya yang dibayangi kesan negatif.

Padahal pemerintah daerah yang mendapat mandat dari masyarakat sudah selayaknya memberikan pelayanan komunikasi pemerintahan yang maksimal dan optimal kepada stakeholdernya. Secara organisatoris, sangat mungkin pemerintah daerah melakukan hal tersebut mengingat personal sarana dan prasarana telah tersedia. Bahkan ada struktur khusus yang ditugasi untuk menjalankannya. Setiap personal yang berada di struktur tersebut sudah selayaknya mempunyai talenta sesuai tupoksinya. Sehingga setiap informasi mampu diolah secara menarik. Setiap informasi yang telah diolah, oleh unit yang lain mampu disampaikan melalui berbagai media, baik yang bersifat personal, kelompok, massa dan media sosial.

Studi awal yang telah dilakukan peneliti pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan selatan menunjukkan bahwa pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan melalui berbagai program seperti

pertemuan dengan pemimpin redaksi media lokal, kerjasama pengisian siaran di televisi, penerbitan tabloid, layanan publik secara online dan sebagainya. Kemudian juga disampaikan kebijakan pemerintah daerah melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan Gubernur maupun wakilnya, dimana mereka menyampaikan pidatonya.

Kegiatan strategis yang dilakukan biro administrasi pimpinan sekretariat pemerintah provinsi Kalimantan selatan adalah pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa. Kegiatan yang dilaksanakan ketika ada kebijakan pembangunan yang baru dan perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat. Pertemuan dengan para pimpinan redaksi ini penting, agar supaya kebijakan tersebut bisa dipahami secara tepat. Diharapkan pemberitaan media massa tentang kebijakan tersebut menghasilkan pemberitaan yang positif bagi pemprov dalam menerapkan kebijakannya. **Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Lokal**, diselenggarakan sejak tahun 2017 mengambil setting formal maupun informal. Mekanisme pelaksanaan kegiatannya, pemprov kal sel yang diwakili oleh tim Biro adpim melakukan pertemuan dengan pimpinan redaksi media membahas berbagai hal, kemudian dilakukan liputan dan dokumentasi publikasi (Biro Adpim, 2020).

Media lainnya adalah **Kerjasama dengan TV siaran lokal**: Duta TV dan Banjar TV. Penyelenggaranya adalah sub bagian liputan dan pemberitaan biro administrasi pimpinan sekretariat pemerintah provinsi Kalimantan selatan. Merupakan program prioritas yang disiarkan kepada masyarakat umum/publik. Kerjasama ini dituangkan dengan sebuah naskah kerjasama (MOU) antara pemprov dengan kedua media tersebut.

Selain itu komunikasi pemerintahan pemprov juga dilaksanakan melalui **pidato-pidato gubernur** yang disampaikan diberbagai kesempatan pertemuan resmi atau informal, juga pada acara-acara seremonial peresmian proyek atau pelaksanaan di mulainya suatu program kegiatan yang dilaksanakan pemprov atau yang di subsidi oleh pemprov. Sasaran komunikasi melalui media ini adalah audien pada saat acara berlangsung. Pelaksana dari kegiatan ini adalah subbag komunikasi pimpinan dan layanan pers. Pidato yang akan disampaikan oleh Gubernur dibuat oleh beberapa konseptor kemudian disampaikan ke Gubernur untuk di koreksi sampai akhirnya pidato tersebut disetujui. Dari uraian diatas didapat kesan, tulisan tentang kebijakan pemrov ini kental dengan kepentingan pemerintah

dan mungkin sedikit sekali mengungkap hal hal negatif atau risiko yang bisa muncul dengan terbitnya kebijakan pemprov tersebut.

Kegiatan biro administrasi pimpinan yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan konten audio visual yang disiarkan oleh beberapa stasiun siaran televisi lokal terkenal di Kalimantan selatan seperti TVRI, Duta TV dan sebagainya. Konten dari siaran ini diolah oleh sub bagian peliputan dan pemberitaan biro adpim, dikemas dalam bentuk wawancara dengan para pejabat pemprov dengan topik yang telah ditentukan, termasuk yang terkait dengan suatu kebijakan pemprov. Pewawancara bisa dari aparat ataupun dari pemandu TV lokal. Siaran wawancara dengan pejabat pemprov di TV lokal ini, sebagai kompensasi dari bantuan finansial yang setiap tahun diberikan kepada stasiun siaran TV lokal tersebut. Karena itu muncul kesan kemungkinan terjadinya pengendalian konten dalam wawancara dengan pejabat tersebut.

Selain melalui surat kabar dan televisi, pemprov juga memanfaatkan media massa radio siaran untuk menyampaikan kebijakannya. Bahkan dalam hal ini pemprov telah mendirikan radio siaran miliknya sendiri yakni Radio Abdi Persada. Awalnya sebagai radio publik lokal, kemudian menjadi Radio Siaran publik lokal sampai sekarang. Diantara acaranya adalah acara ronda kota, yang isinya membahas kebijakan pemerintah dan masalah masalah aktual secara interaktif. Dengan mengenali status radio siaran ini, dan krunya yang semuanya orang pemprov, timbul kesan ada kemungkinan para pemandu atau pewawancara telah diarahkan agar memandu wawancara dengan konten yang memperkuat kebijakan.

Perkembangan teknologi media yang begitu cepat, membawa pemprop berpartisipasi juga dalam memanfaatkan media sosial. Awalnya unit website (WWW.Kalselgo.id) adalah sebagai unit PDE (Pusat Data Elektronik). Namun unit menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan tidak bisa berfungsi secara optimal. Seperti tidak semua kebijakan bisa dipublikasikan. Sebabnya, ada SKPD yang tidak mau memberi data. Meskipun semua SKPD yang mempunyai website mengkonekkanya ke website Biro adpim pemprop kal sel.

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah inti permasalahan yakni komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Selatan kepada stakeholdernya masih mengalami hambatan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah semua stakeholder pemprov Kalimantan selatan sudah mendapatkan informasi dan penjelasan yang optimal tentang kebijakannya?.

Di Pemprov Kalimantan selatan ada struktur biro administrasi pimpinan dan Dinas kominfo yang merupakan "leading Sector" untuk mengelola komunikasi pemerintahan. Apakah program program kegiatannya sudah direncanakan dengan optimal? Bagaimana pelaksanaannya? Apa kendala dan faktor penghambatnya.

Stakeholder merupakan obyek komunikasi pemerintahan yang juga sekaligus sebagai subyeknya. Mereka berhak mengetahui, mengerti dan mengawasi konten program-program tersebut terutama yang isinya tentang kebijakan pemda propinsi Kalimantan Selatan. Bahkan mereka berhak untuk menilai bagaimana kualitas pelayanan komunikasi pemerintahan pemprop dalam pemberitaan kebijakannya kepada stakeholder.

1.2. Rumusan Masalah

Dari indentifikasi permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah yang jawaban atasnya adalah alternatif pemecahan yang harus dilakukan melalui sebuah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut,

- a. Bagaimana karakteristik komunikasi pemerintahan pemerintah provinsi Kalimantan selatan dalam pemberitaan kebijakan pemda kepada stakeholdernya?
- b. Bagaimana kualitas pelayanan komunikasi pemerintahan pemprov dalam pemberitaan kebijakan pemda kepada stakeholdernya?
- c. Apa saja kendala dan hambatan pelayanan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada stakeholder?
- d. Bagaimana rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda provinsi Kalimantan Selatan kepada stakeholdernya?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan utama dari Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini adalah terciptanya teknologi manajemen berupa rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda kepada stakeholdernya.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini, adalah menyusun 'Rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda provinsi Kalimantan selatan kepada stakeholdernya di Kalimantan Selatan'.

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian di atas diharapkan menghasilkan kegunaan baik yang bersifat keilmuan maupun yang bersifat Pembangunan

a. Manfaat Keilmuan

- (1) Menyusun rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam kajian ilmu komunikasi dan Ilmu Pemerintahan terapan disiplin Ilmu Sosial dan Ilmu politik,
- (2) Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi terutama pada aspek metodologis terutama pada kajian komunikasi pemerintahan, khususnya dalam peningkatan pelayanan pemberitaan kepada stakeholder pemerintah.
- (3) Salahsatu sumber informasi bagi penelitian sejenis.

b. Manfaat Pembangunan

- 1) Memberikan saran kepada pemda provinsi Kalimantan selatan sebagai pembuat kebijakan, tentang pentingnya optimalisasi pelayanan komunikasi pemerintahan bagi stakeholdernya
- 2) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadikan rekomendasi layanan komunikasi pemerintahan ini sebagai dasar pelayanan komunikasi yang optimal berbasis stakeholder pada masing masing wilayah kewenangannya.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemberitaan berasal dari kata berita atau *news*. Karena itu sebelum merumuskan apa itu pemberitaan, perlu dipahami dulu pengertian berita tersebut. Rosihan Anwar (1974), dalam bukunya *ihwal Jurnalistik*, mengungkapkan secara tidak langsung definisi berita dengan kata-kata "Reporter tentunya hanya menginsafi bahwa surat kabar, radio dan televisi memberitakan atau melaporkan beberapa kejadian yang penting untuk diketahui oleh khalayak ramai". Sehingga bisa diambil intisarinya, berita didefinisikan sebagai apa yang ingin dan perlu orang ketahui. Kemudian dalam *Concise Oxford Dictionary* tertulis "*tidings, news or interesting information, fresh event*". Penelitian ini mendefinisikan berita adalah kabar keseharian, laporan kejadian yang menarik, berita adalah realitas tangan kedua (*second hand reality*); berita tidak hanya kejadian yang kebetulan, berita ternyata bisa dibuat dan direkayasa (Ibrahim 2007). Sehingga pemberitaan didefinisikan sebagai kegiatan memberitakan peristiwa, apa yang ingin diketahui dan perlu diketahui orang, realitas tangan kedua atau realitas yang dibuat/direkayasa.

Kebijakan pemerintah daerah didefinisikan dari kata kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not todo*). David Easton mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan". Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah meliputi seluruh kehidupan masyarakat. H. Hugh Hego menyebut kebijakan sebagai "*a course of action intended to accomplish some end*" atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini kemudian dirinci oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan yaitu: Pertama, tujuan tertentu yang dikehendaki ingin dicapai, bukan suatu tujuan yang hanya diinginkan saja, tetapi ada usaha untuk mencapainya, dan ada faktor pendukung yang diperlukan. Kedua, rencana atau *proposals* yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud. Keempat, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk

menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima, dampak (efek), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. Jones (1977) merumuskan kebijakan sebagai "*behavioural consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems*" (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Peneliti mengacu definisi kebijakan pemerintah sebagaimana definisi terakhir ini. Selanjutnya kebijakan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

Sehingga pemberitaan kebijakan pemerintah daerah adalah kegiatan memberitakan apa yang ingin diketahui dan perlu diketahui orang, terkait dengan usaha pemerintah daerah dan melalui pemerintah daerah untuk memecahkan masalah umum.

2.1.2. Stakeholders

Struktur humas yang ada di pemerintah daerah berkewajiban membina hubungan baik dengan pihak-pihak yang ada di dalam maupun luar pemerintahan melalui proses komunikasi. Pihak-pihak yang menjadi sasaran humas disebut juga stakeholders. Diartikan juga sebagai pihak yang mempunyai peran yang menentukan bagi lembaga. Penulis manajemen menyebutkan stakeholders terdiri atas berbagai kelompok penekan (*pressure group*) yang meski dipertimbangkan lembaga (Kasali, 1994). Sementara itu Mahmud (1993) menyebutkan publik humas terdiri dari publik internal dan publik eksternal. Khalayak adalah "pillar" (soko-guru) yang merupakan modal pokok bagi pelaksanaan suatu program. Khalayak eksternal terdiri dari bermacam-macam segmentasi atau golongan, dengan edukasi, tingkat kehidupan berbeda dan sebagainya. Pendekatan terhadap khalayak luar berbeda dengan cara yang dilakukan dengan khalayak dalam. Karena itu setiap program eksternal kehumasan dapat disesuaikan guna mencapai hasil yang diharapkan.

Dari uraian diatas dapat didefinisikan stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang, pengelompokan atau organisasi yang berada diluar pemda yang penting bagi pemda atau yang berkepentingan dengan pemda dalam pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda propinsi Kalimantan selatan.

2.13. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing ideas), instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings) (Malone, 1997: 170) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya.

Pemahaman tentang peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi pemerintah, seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar, memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk managing staff dan managing people. Komunikasi pemerintahan untuk managing people merupakan komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan dan juga informasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi. (Garnet (1989: 546).

Satu model umum tentang proses komunikasi pemerintahan diawali oleh pengirim (administrator atau manajer pemerintah) yang berusaha berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat dan organisasi lain. Untuk itu dipilih seperangkat informasi sebagai pesan yang ingin dikirimkan (ideation). Ketika hendak mengirim informasi, pengirim menterjemahkan informasi tersebut dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang tepat yang diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh penerima dan diharapkan memiliki efek terhadap

orang lain. Ekspresi gagasan atau ide dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan), atau nonverbal (bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan, atau gambar), disebut pesan (message). Pesan yang disampaikan dapat berupa kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan.

Jadi komunikasi pemerintahan pada hakekatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk mempengaruhi sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan di waktu lain ia menjadi receiver.

Juga merupakan sarana penyaluran masukan sosial ke dalam sistem sosial, dan sarana memodifikasi perilaku, mempengaruhi perubahan, memproduktifkan informasi, sarana untuk mencapai tujuan serta membantu pelaksanaan dan memadukan fungsi-fungsi manajemen (Pearce and Robinson, 1989: 550). Adapun fungsi komunikasi dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah sebagai organisasi nonprofit adalah: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Fungsi informatif berarti, komunikasi dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi dan kemudian menyebarkannya kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Regulasi dibuat melalui proses komunikasi oleh orang-orang yang berada dalam posisi otoritas pembuat regulasi. Fungsi persuasif dimaksudkan sebagai suatu cara melalui komunikasi dilakukan persuasi kepada orang lain sehingga mereka menerima pesan dan melaksanakannya dengan cara sukarela, tanpa paksaan atau dipaksa.

Komunikasi pemerintahan eksternal organisasi dimaksudkan untuk mengirim informasi publik (public information) oleh administrator/aparatur kepada masyarakat dan sektor swasta (private sector) atau sektor bisnis (business sector) dan mengakomodasi opini publik (public opinion) dari masyarakat dan sektor bisnis. Ini penting dalam era demokratisasi dan desentralisasi atau otonomi daerah dan good public governance (kepemerintahan sektor public

yang baik). Oleh karena good public governance menekankan ada tiga pilar atau pelaku yaitu: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dan ketiga pilar tersebut membangun kemitraan (partnership), maka masyarakat dan sektor privat juga menempati posisi penting dalam proses komunikasi pemerintahan. Dengan kata lain, partnership antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dapat berjalan efektif jika proses komunikasi di antara ketiganya juga berjalan efektif. Pemerintah sebagai sender ketika secara intensif menyampaikan informasi publik berupa kebijakan sedangkan masyarakat dan sektor swasta menjadi receiver ketika ia menerima informasi tersebut. Dunia usaha menjadi sender ketika memberi umpanbalik atas informasi yang diterima dan menyampaikan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan dunia usaha sedangkan pemerintah dan masyarakat menjadi receiver atas informasi tersebut. Masyarakat menjadi sender ketika memberi informasi yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat dan memberi umpanbalik atas informasi yang diterima sementara pemerintah dan dunia usaha menjadi receiver atas informasi tersebut. Untuk menjadi efektif, proses komunikasi antara bisnis dan pemerintah, misalnya, harus memperlihatkan "two-way affair" dengan mengutamakan timely dan accurate.

Komunikasi pemerintahan dalam good governance menekankan ketanggapan (responsiveness), transparansi (transparency), partisipasi (participation), dan akuntabilitas (accountability). Ketanggapan berarti perhatian manajemen publik harus secara konstan, intensif, dan cepat terhadap informasi yang disampaikan secara langsung oleh warga baik kepada birokrasi maupun melalui legislator atau politisi (Denhardt dan Grubbs, 1999: 19; Frederickson, 1984:52); transparansi berarti memberi informasi secara benar, jujur dan adil; partisipasi berarti masyarakat diikutsertakan memberi informasi dalam membuat kebijakan dan berjalannya kontrol sosial; dan akuntabilitas menunjukkan suasana pemerintahan yang bertanggungjawab atas informasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang penting dalam good governance ialah informasi sektor publik berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan administrasi; informasi sektor dunia usaha yang berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi; dan informasi sektor sosial yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak dijangkau oleh institusi public dan bisnis.

Administrator dalam organisasi pemerintah secara normal ditekankan dari banyak pihak dengan informasional dan sumber data yang mengalir ke dalam jabatan-jabatannya dari atasan

mereka, subordinasi, badan-badan lain, kelompok warga, dan publik. Kadang-kadang informasi diterima melalui saluran-saluran formal rutin; pada waktu lain itu menetes ke bawah kepada administrator melalui rute tak diminta.

Hasan (2005) mendefinisikan Komunikasi pemerintahan adalah, penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai idea atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat). Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

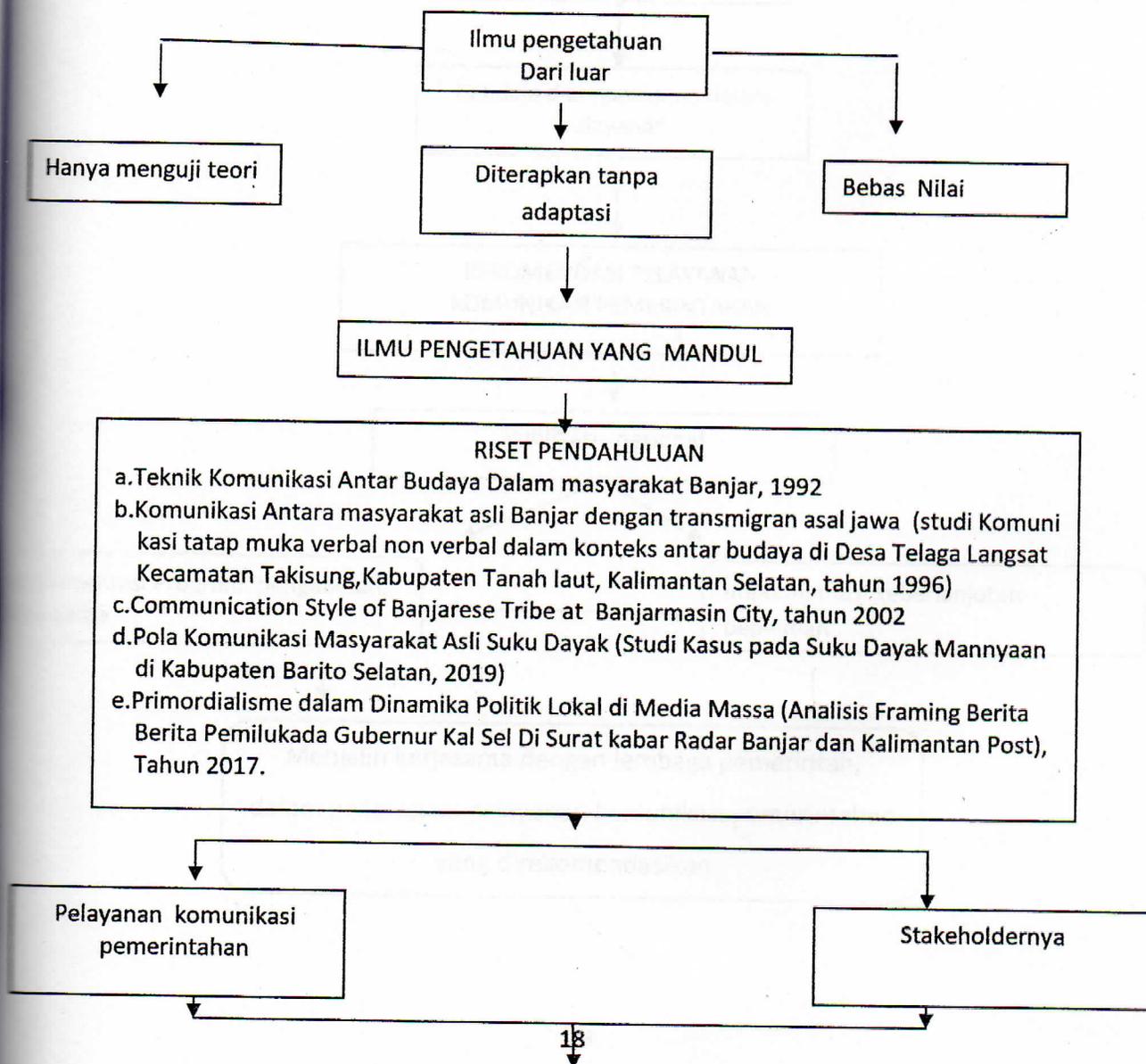
Di antara permasalahan yang terjadi pada komunikasi pemerintahan adalah informasi idea atau gagasan yang disampaikan oleh pihak pertama (komunikator) bertujuan agar pihak kedua (komunikan) dapat menangkap ide dan gagasan tersebut dengan pengertian yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh pihak pertama. Namun untuk kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecenderungannya adalah agar tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kenyataan di lapangan memang sering terjadi distorsi atau gangguan bahkan kesalahpahaman ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayani namun karena dalam sistem pemerintahan ada etika yang dipegang teguh oleh aparatur pemerintah maka sering kejanggalan dan permasalahan tersebut diselesaikan intern di lingkungan pemerintahan.

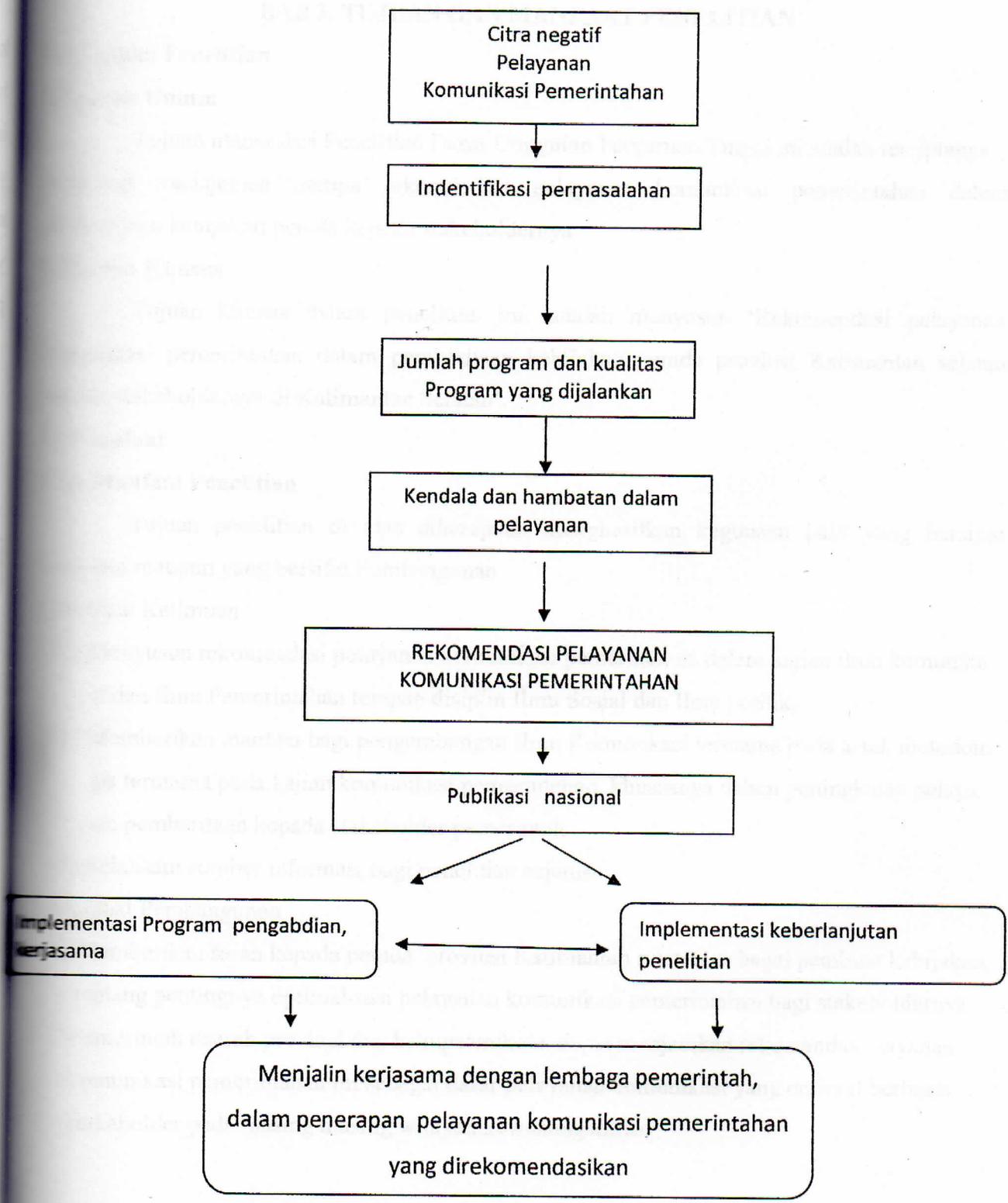
Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pihak pertama (komunikator) mampu menggerakkan pihak kedua (komunikan) untuk mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai idenya, bagaimana hubungan antara kemampuan kerja dengan sarana, prasarana, situasi dan lingkungan mempengaruhinya, dan bagaimana cara terbaik menyampaikan pekerjaan atau tugas kepada bawahan, mengingat kemampuan individu tidak sama, sampai dimanakah pengaruh kemauan kerja dari pihak kedua dan bagaimana cara mengkomunikasikan pekerjaan atau tugas-tugas kepada pihak kedua agar efektif.

Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya pendekatan faktual, dan aktual namun sebelumnya perlu penguasaan dan pemahaman komunikasi yang benar secara komprehensif

Rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan Pemda kepada stakeholdernya yang akan dihasilkan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan solusi untuk menghasilkan setiap pemberitaan kebijakan pemda berbasis stakeholder. Penelitian ini juga mendukung penerapan Iptek untuk meningkatkan teknologi manajemen pemberitaan yang berbasis stakeholder. Dengan demikian penelitian ini mendukung roadmap peneliti yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan ilmu yang membumi, yakni ilmu komunikasi yang dilahirkan dari interaksi manusia di lingkungan lahan basah. (lihat Peta jalan Penelitian pada gambar 2.1).

GAMBAR 2.1.
Peta Jalan Penelitian





BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan utama dari Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi ini adalah terciptanya teknologi manajemen berupa rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda kepada stakeholdernya.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini, adalah menyusun 'Rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda provinsi Kalimantan selatan kepada stakeholdernya di Kalimantan Selatan'.

3.2. Manfaat

3.2.1. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian di atas diharapkan menghasilkan kegunaan baik yang bersifat keilmuan maupun yang bersifat Pembangunan

a. Manfaat Keilmuan

- (1) Menyusun rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam kajian ilmu komunikasi dan Ilmu Pemerintahan terapan disiplin Ilmu Sosial dan Ilmu politik,
- (2) Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi terutama pada aspek metodologis terutama pada kajian komunikasi pemerintahan, khususnya dalam peningkatan pelayanan pemberitaan kepada stakeholder pemerintah.
- (3) Salahsatu sumber informasi bagi penelitian sejenis.

b. Manfaat Pembangunan

- 1) Memberikan saran kepada pemda provinsi Kalimantan selatan sebagai pembuat kebijakan, tentang pentingnya optimalisasi pelayanan komunikasi pemerintahan bagi stakeholdernya
- 2) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadikan rekomendasi layanan komunikasi pemerintahan ini sebagai dasar pelayanan komunikasi yang optimal berbasis stakeholder pada masing masing wilayah kewenangannya.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mendekati obyek penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif secara holistik. Sehingga data yang didapatkan memiliki kualitas yang tinggi. Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan (field research) dilapangan. Sementara data skunder dari study kepustakaan (library research). Seluruh gambaran analisis data yang ditemukan dilapangan akan dirangkai menjadi sebuah rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan dalam pemberitaan kebijakan pemda kepada stakeholdernya dengan didukung oleh data yang ada. Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada peta jalan penelitian yang peneliti buat.

Konteks lokasi penelitian ini adalah Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel. Penelitian ini dilakukan mulai Januari hingga oktober 2020. Objek penelitian ini adalah proses dan kegiatan komunikasi pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Fokus pengamatan adalah komunikasi pemerintah di bidang layanan publik dari pemerintah daerah Kalimantan Selatan di situs <http://www.kalselprov.go.id>; bagaimana fungsinya sebagai lembaga komunikasi publik kepada warganya dan respons dari pemangku kepentingan utama terhadap kinerja komunikator pemerintah daerah dalam komunikasi pegawai negeri dipemerintah daerah mereka; serta layanan komunikasi pemerintahan pemprov kal sel melalui media offline lainnya.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor gubernur provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada struktur Biro administrasi pimpinan sekretariat pemprov dan sruktur Dinas kominfo pemprov kalsel. Selain itu juga dilakukan pada lokasi tertentu di propinsi Kalimantan selatan dimana ditemukan informan kunci yang bisa memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan masalah atau pertanyaan penelitian ini. Waktu pelaksanaan penelitian di lapangan dan di tempat tempat studi kepustakaan berlangsung selama 1 (satu) tahun

4.3. Informan Penelitian

Informan dipilih berdasarkan kreteria yang sudah ditentukan, kemudian dari informan sebelumnya didapatkan informan berikutnya untuk memenuhi data yang diperlukan. Jika data

yang diperoleh sudah jenuh, maka pencarian data bisa dihentikan berarti tidak diperlukan lagi informan berikutnya.

4.4. Variabel, Sumber Data Penelitian dan Indikator Capaian

Variabel penelitian merupakan aspek yang akan dikaji dalam penelitian. Kemudian dari variabel ini ditemukan indikator. Berdasarkan indikator ini dibuat panduan teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan alat penelitian dilakukan pengumpulan dari informan dengan menggunakan teknik triangulasi dari para informan. Pengumpulan data ini melibatkan para informan yang terdiri dari aparat pemda dan bermacam macam stakeholder dari luar pemda (lihat tabel.4.1).

Tabel 4.1.
Variabel, Sumber data, alat dan Indikator capaian

No	Variabel/Aspek	Indikator Capaian	Alat	Sumber Data
1	Pelayanan komunikasi pemerintahan	a. Jumlah program/kegiatan pemberitaan terkait b. Kualitas program/kegiatan pemberitaan terkait	a. Panduan observasi b. Depth Interview kepada stakeholder. c. Pertanyaan essay mendalam	a. Observasi kegiatan pelayanan b. Depth interview dari informan c. Pertanyaan essay dengan aparat

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi:

- a. Observasi Lapangan

Hasil observasi lapangan akan diperoleh gambaran pelayanan komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat dilapangan

b. Wawancara

Wawancara menggunakan cara mendalam (indepth interview) yang dipandu oleh sebuah panduan. Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan kunci di lokasi penelitian maupun di tempat yang telah disepakati sehingga didapatkan data primer. Informan yang menjadi nara sumber seperti: aparat pemda provinsi Kal sel, stakeholder dari luar pemprov yang terdiri antara lain: politisi, anggota DPRD, jurnalis, pedagang, tokoh politik, pejabat pemda diluar pemprov kal sel.

c. Pertanyaan Essay Mendalam

Hal ini dilakukan, bila wawancara langsung tidak bisa dilaksanakan, terkait wabah covid

- 19

d. Dokomentasi

Pengumpulan data di perpustakaan baik perpustakaan umum maupun pribadi dari jurnal, buku, surat kabar, peraturan yang menyediakan data dan informasi terkait dengan masalah dan rekomendasi penelitian.

4.6. Teknik Analisis Data

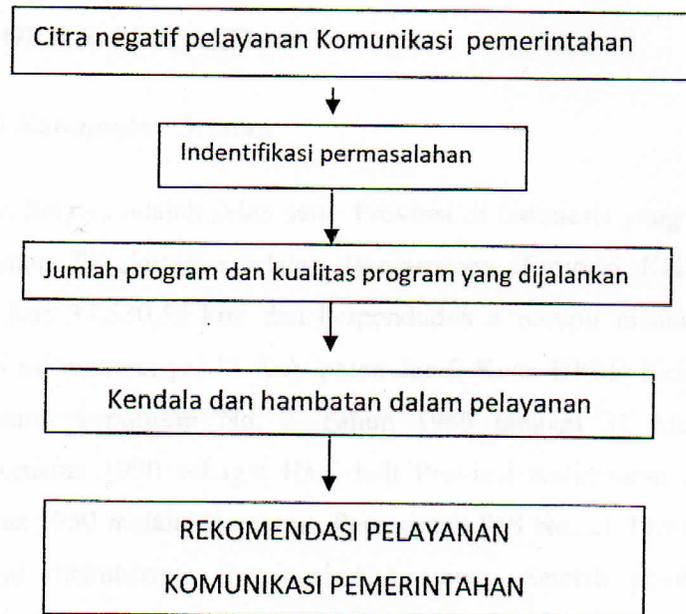
Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang dipergunakan analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Analisis data ini bersifat interaktif, meliputi empat komponen: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

4.7. Diagram Alir Penelitian.

Penelitian menggambarkan proses kegiatan mulai munculnya permasalahan, identifikasi permasalahan, menemukan indikator permasalahan, menemukan kendala dan hambatan, sampai menemukan rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan, di pemerintah propinsi Kalimantan selatan (lihat gambar 4.2). Luaran hasil penelitian ini akan dipublikasikan diseminar nasional, dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah propinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 4.2.

Diagram Alir Penelitian



4.3. Luaran Penelitian

Draft Artikel yang akan diterbitkan pada Jurnal Nasional terakreditasi dan rekomendasi pelayanan komunikasi pemerintahan pada setiap pemberitaan kebijakan pemerintah daerah Kalimantan selatan pada stakeholdernya yang berkarakter lingkungan lahan basah.

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. HASIL PENELITIAN

5.1.1. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Gambaran Profil Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dan berpenduduk ± hampir mencapai 3,7 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 Kabupaten dan 2 Kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya Provisasi Kalimantan. Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.616 jiwa

Sejarah Pemerintahan Kalimantan Selatan

Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Daha, Negara Dipa dan Kesultanan Banjar. Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan dijadikan provinsi tersendiri dengan Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor. Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan juga diwarnai dengan terbentuknya organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV di Mojokerto, Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan ini pemimpin ALRI IV mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai bagian wilayah Indonesia, melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI Hasan Basry di Kandangan 17 Mei 1949 yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memaklumkan

berdirinya pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan (dan tengah). Wilayah itu dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Upaya yang dilakukan dianggap sebagai upaya tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda.

Menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalami penataan. Di wilayah Kalimantan, penataan antara lain berupa pemecahan daerah Kalimantan menjadi 3 provinsi masing-masing Kalimantan Barat, Timur dan Selatan yang dituangkan dalam UU No.25 Tahun 1956. Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957, sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah, dan tetap seperti adanya. Adapun UU No.25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1957 dan UU No.27 Tahun 1959.

Pemerintahan Saat Ini

Sejak tanggal 14 Agustus 2011, aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan selatan, meliputi 11 Kabupaten dan 2 Kota mandiri.

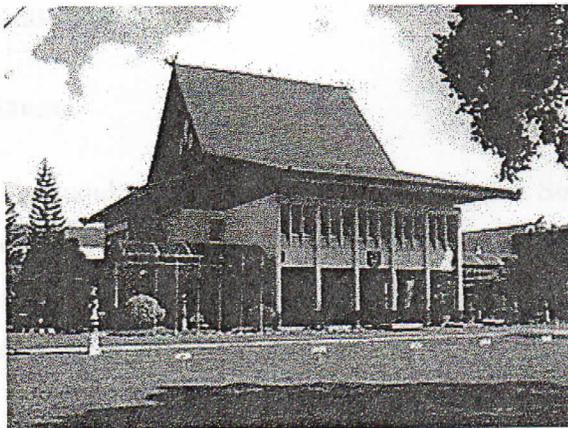
Tabel 5.1.
Daftar Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kabupaten Balangan	Paringin	8	152
2	Kabupaten Banjar	Martapura	19	288
3	Kabupaten BaritoKuala	Marabahan	17	200

4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan	11	148
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai	11	169
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai	10	219
7	Kabupaten Kota Baru	Kotabaru	20	197
8	Kabupaten Tabalong	Tanjung	12	131
9	Kabupaten Tanah Bumbu	Batulicin	10	135
10	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	11	135
11	Kabupaten Tapin	Rantau	12	131
12	Kota Banjar Baru	-	5	50
13	Kota Banjarmasin	-	5	20

Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010.

Sementara hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.



Gambar 1. Kantor Gubernur Kalimantan Selatan dengan motif Rumah Banjar Motif Bubungan Tinggi. Kawasan ini dahulu lokasi rumah Residen Belanda yang dinamakan Kampung Amerongan

Kondisi dan Sumber Daya Alam

Geografi

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.

Keanekaragaman hayati

Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.

Sumber Daya Alam

Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.

Kependudukan

Suku bangsa

Penduduk asli Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar yang merupakan mayoritas dari total penduduk. Suku Banjar yang menempati seluruh wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan Banjar Batang Banyu.

Suku pendatang yang signifikan jumlahnya di Kalimantan Selatan yaitu Suku Jawa yang terutama menempati kawasan transmigrasi. Suku Madura dan Suku Sunda juga terdapat di Kalimantan Selatan dan mendiami sebagian kawasan transmigrasi di Kalsel. Selain itu terdapat pula Suku Bugis (termasuk Orang Bugis Pagatan) dan Suku Mandar yang berasal dari Sulawesi dan menempati daerah pesisir Tanah Bumbu dan Kotabaru. Suku Dayak di Kalimantan Selatan menempati kawasan Pegunungan Meratus (Suku dayak Bukit) dan aliran Sungai Barito (Suku dayak Bakumpai).

Kelompok etnis lainnya di Kalimantan Selatan yaitu etnis keturunan Arab yang menempati kawasan perkotaan, seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Terdapat pula etnis keturunan Tionghoa yang mendiami perkotaan terutama Kota Banjarmasin dan Sungai Parit di Pelaihari (disebut Orang Cina Parit).

Tabel. 5.2.

Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Selatan

No	Suku Bangsa	Jumlah	Konsentrasi
1	<u>Suku Banjar</u>	2.271.586	76,34%
2	<u>Suku Jawa</u>	391.030	13,14%
3	<u>Suku Bugis</u>	73.037	2,45%
4	<u>Suku Madura</u>	36.334	1,22%
5	<u>Suku Bukit</u>	35.838	1,20%
6	<u>Suku Mandar</u>	29.322	0,99%
7	<u>Suku Bakumpai</u>	20.609	0,69%
8	<u>Suku Sunda</u>	18.519	0,62%
9	Suku-suku lainnya	99.165	3,34%
	Total	2.975.440	100,00%

Pertanian & Perkebunan

Hasil utama pertanian adalah padi, di samping jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pisang, durian, rambutan, kasturi dan langsung.

Industri

Industri di Kalimantan Selatan didominasi oleh industri manufaktur mikro dan kecil, disusul oleh industri manufaktur besar dan sedang. Sampai pada tahun 2010, jumlah unit usaha berjumlah 60.432 unit, meningkat 10,92% dibandingkan pada tahun 2009.

Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan peluang usaha yang potensial di Kalimantan Selatan karena banyak objek-objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam negeri mau pun dari mancanegara.

Kalimantan Selatan memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, dan gunung. Selain itu pariwisata Kalimantan Selatan juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Pasar Terapung, Festival Tanglong, dan lain-lain. Disamping wisata alam dan budaya, Kalimantan Selatan juga terkenal dengan wisata kulinernya.

5.1.2. POTRET KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN SELATAN

LATAS

Provinsi Kalimantan Selatan beribukota di Banjarmasin. Kota ini dan Kota Banjarbaru menjadi lingkungan komunikasi Pemerintahan Pemprov Kal sel yang penting. Kedua kota memang mempunyai keterkaitan kuat dengan pemprov kal sel. Kota Banjarmasin sejak merdeka sampai sekarang menjadi ibukota provinsi Kalimantan selatan. Sementara kota Banjarbaru sejak tahun 2011 telah menjadi pusat perkantoran pemerintah provinsi Kalimantan selatan. Karena itu potret

komunikasi pemerintahan provinsi Kalimantan selatan sedikit banyak ter kena pengaruh pola komunikasi pemerintahan yang terjadi dikedua kota tersebut.

Komunikasi Eksekutif

Pengolahan komunikasi eksekutif ditangani oleh sekwilda cq. Asisten administrasi umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, serta penyiapan materi dan komunikasi pimpinan dan protokol. (Dinas Kominfo Prov Kal sel, 2020)

Komunikasi – komunikasi formal dalam bentuk rapat – rapat koordinasi yang terjadwal dikelola oleh sekwilda cq Asisten administrasi umum. Komunikasi – komunikasi formal dalam bentuk rapat – rapat koordinasi yang isidentil dikelola oleh kepala – kepala Dinas / Badan terkait. Kedua rapat koordinasi diatas biasanya dipimpin oleh Gubernur

Selain rapat koordinasi ada juga rapat staff. Kalau rapat koordinasi bertujuan untuk mensinergikan potensi dan langkah; maka rapat staff dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas – tugas pokok.

Diluar rapat – rapat diatas komunikasi bisa dilakukan bila keadaan mendesak.

Secara umum mekanisme kerja pelayanan informasi kepada publik melalui 2 (dua) cara. Pertama melalui dinas – dinas / badan – badan atau bagian – bagian secara langsung. Kedua melalui satu pintu, yaitu melalui dinas kominfo. Dalam hal ini Dinas kominfo mengumpulkan informasi yang diperlukan dari Dinas / bagian / badan / pimpinan dilingkungan Pemprov, kemudian menyaringnya sebelum disampaikan kepada publik yang meminta. Sementara untuk dilegislatif mekanismenya cukup berbeda

Komunikasi Legislatif

Di DPRD penanganan komunikasi dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan disatu pihak dan sekretaris dewan di pihak lain

Pelaksanaan komunikasi formal internal di – Dewan dilakukan dalam bentuk rapat – rapat yang ada di DPRD provinsi. Misalnya, rapat paripurna, rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat panitia khusus, rapat komisi serta rapat pimpinan.

Rapat paripurna bertujuan untuk mendengarkan pandangan akhir setiap fraksi dan pengambilan keputusan. Rapat Pan – Mus untuk menjadwalkan dan menetapkan materi rapat – rapat. Rapat Pang – Ang untuk membuat dan membahas RAPBD, rapat Pan – Sus untuk mendalami raperda atau mengkaji suatu masalah. Sementara rapat komisi selain dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan juga dihadiri oleh undangan, misalnya anggota masyarakat atau aparat pemprov terkait. Dari para undangan ini diharapkan muncul penjelasan, input, aspirasi dan sebagainya.

Selain melalui rapat – rapat komisi dan Pan – Sus, penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan juga oleh Dewan dan Sekwan, melalui surat dan laporan yang masuk, maupun penyampaian pendapat secara lisan atau penyampaian aspirasi dalam suatu demo masyarakat.

Komunikasi eksternal untuk memberikan tanggapan atas pernyataan masyarakat atau wartawan dapat dilakukan oleh pimpinan maupun setiap anggota Dewan sesuai dengan kapasitasnya. Karena itu bisa saja terjadi “perang statment” diantara mereka.

Kadang – kadang bisa juga pimpinan Dewan memerintahkan kepada Sekwan untuk memberikan penjelasan atau mencounter berita – berita tentang DPRD Provinsi yang dianggap mereka “agak miring”.

Berita semacam itu, bahkan dapat mengganggu hubungan Legislatif dengan Eksekutif.

Komunikasi Eksekutif-Legislatif

Forum komunikasi formal diantara dua lembaga ini adalah dalam bentuk rapat – rapat paripurna dan rapat – rapat komisi (rapat kerja).

Pada forum diatas biasanya terjadi adu pendapat dan argumentasi, yang bersifat formal. Masing – masing berbicara seperti yang sudah dipersiapkan. Namun biasanya bahan rapat disampaikan mendekati hari H rapat, sehingga pihak yang berperan untuk memberi tanggapan, punya waktu yang sedikit untuk mengkaji bahan tersebut. Karena itu wajar jika pada forum tersebut kendali lebih dikuasai oleh pihak penggagas.

Pada banyak kesempatan dimana eksekutif berada pada posisi sebagai penggagas, biasanya mereka diwakili pejabat teknis yang sangat menguasai permasalahan, sementara dewan memiliki banyak keterbatasan di bidang itu. (*Observasi Partisipan, 2020*).

Selain pada forum diatas, komunikasi legislatif sering juga ditujukan ke eksekutif melalui media massa/online. Isi komunikasi tersebut bersifat kontrol maupun teguran terhadap eksekutif. Sehingga tidak jarang tergambar kurang harmonisnya komunikasi di antara kedua lembaga ini

Gambaran kurang harmonisnya komunikasi, juga terlihat pada komunikasi eksekutif – masyarakat.

KOMUNIKASI EKSEKUTIF – MASYARAKAT.

Pemprov berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan media. Acapkali yang tampil sebagai komunikator adalah Gubernur sendiri atau pejabat di bawahnya, yang terkait dengan materi yang dibicarakan.

Sifat komunikasi dari eksekutif ini kontradiktif, konfrontatif dan menggunakan bahasa kekuasaan.

Sifat kontradiktif tersebut misalnya bisa ditemukan di koran lokal, atau di siaran TV ,dimana seorang kepala dinas yang pernyataannya

tentang suatu kebijakan misalnya berseberangan dengan pejabat di bawahnya.

Sementara sifat konfrontatif tercermin dari pernyataan pejabat, yang menantang para peneritiknya untuk menunjukkan bukti, dan sekaligus menuduh mereka sebagai orang yang tidak mengetahui prosedur.

Selain cenderung kontradiktif dan konfrontatif, pihak eksekutif juga cenderung menggunakan bahasa kekuasaan ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya, menggunakan kata “gusur”, untuk menertibkan PKL ketimbang menggunakan kata “Pemindahan ketempat lain yang layak dan aman”. (*Wawancara dengan informan PKL, tahun 2020*)

KOMUNIKASI EKSEKUTIF – MEDIA MASSA/ONLINE.

Forum komunikasi resmi dan melembaga antara eksekutif dengan media massa belum ada. Selama ini pembinaan komunikasi dilakukan melalui kerja sama yang bersifat isidentil.

Selain itu dalam bentuk diatas dilakukan juga pembinaan melalui pengadaan Press Room, serta penyediaan bahan apa saja yang dibutuhkan wartawan untuk pemberitaan.

Sewaktu – waktu wartawan diikutsertakan dalam suatu pertemuan terbuka, atau suatu kunjungan yang dilakukan Pejabat Pemprov.

Kadang – kadang juga para wartawan yang berada di Press Room mendapat insentif dari Pemprov, keadaan yang hampir “sama” terjadi juga pada komunikasi legislatif – media massa/media online.

KOMUNIKASI LEGISLATIF – MEDIA MASSA/ONLINE.

Penanganan hal ini seperti apa yang dilakukan eksekutif. Komunikasi dengan media massa/online ditangani oleh sekretariat dewan.

Terkait menangani hubungan komunikasi legislative dengan media massa/online yang dijalankan ada menyiapkan keperluan wartawan dalam menjalankan tugas.

Berbeda dengan hal di atas komunikasi media massa/online – eksekutif – legislatif – masyarakat lebih rumit keadaannya.

KOMUNIKASI MEDIA MASSA/ONLINE – EKSEKUTIF – LEGISLATIF--MASYARAKAT.

Media massa/online dalam proses komunikasi selain berperan sebagai media, juga berperan sebagai komunikator. Dalam hal ini media massa/online dapat mempengaruhi pihak – pihak lain, misalnya eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

Khusus pada media massa cetak (surat kabar) dapat kita temukan judul – judul pemberitaan yang apabila dicocokkan dengan isi keseluruhannya, melebihi dari keadaan yang sebenarnya. Atau ada juga judul – judul pemberitaan yang “memanas – manasi”, bahkan ada yang mendiskreditkan. Bisa saja pejabat yang tenang dalam menghadapi pendemo dalam memberikan tanggapan atas tuntutan ditulis “menganggap remeh”

Bahkan tidak jarang judul – judul berita di media massa cetak tertentu bukan hanya sekedar sensasi, memanas – manasi, melainkan juga mendiskreditkan.

Masih dalam kerangka sebagai komunikator, media massa/online juga melakukan “ strategi “ dalam memilih source. Media massa/online di daerah ini – khususnya media massa cetak – lebih senang memilih orang – orang yang vocal sebagai nara sumber. Memang dengan cara diatas, dapat disajikan suatu pemberitaan dengan judul yang vocal dan isi yang berani yang menarik kebanyakan orang. Tentunya, aspirasi masyarakat lain juga harus disalurkan.

KOMUNIKASI MASYARAKAT – MEDIA MASSA – LEGISLATIF – EKSEKUTIF

Saat ini relatif lebih banyak orang yang berani menyatakan pendapatnya, ketimbang pada masa orde baru. Karena itu tepat jika media massa/online menyediakan waktu atau ruang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Di Kalimantan Selatan tersedia media massa/online yang cukup banyak. Baik milik swasta maupun pemerintah. Tercatat ada 1 Televisi lokal pemerintah dan beberapa televisi lokal swasta mandiri atau berjaringan. Jumlah televisi swasta keseluruhan berjumlah 22 buah. Sementara jumlah surat kabar harian, mingguan serta tabloid di kal sel mencapai 44 buah, sama banyaknya dengan jumlah radio siaran di kal sel, salah satunya radio pemerintah, dan beberapa radio pemerintah daerah seperti Radio Siaran ‘Abdi Persada’ . Sementara pengguna internet di kalsel lebih empat juta. Sedangkan pengguna Hp mencapai sekitar dua juta. Hampir semua media massa/online menyediakan ruang atau waktu untuk menerima respon dari masyarakat. Dengan berbagai judul ruang atau waktu, misalnya: Talkshow, surat pembaca dan sebagainya. Namun kebanyakan masih belum banyak dimanfaatkan oleh public/massanya.

Sayangnya, tanggapan dari pihak Pemprov selama ini, terhadap aspirasi tersebut masih kurang memadai. Hal ini tercermin, dari betapa sulitnya menghubungi yang bersangkutan, isi tanggapannya sendiri, apalagi jika diteliti sejauh mana tindak lanjutnya. Singkatnya sikap Pemprov ini dapat disimpulkan dalam dua kata yaitu : “ogah – ogahan” (untuk merespon aspirasi dari masyarakatnya). (*Informan, pekerja media massa/online, tahun 2020*).

Sementara itu masyarakat yang rendah kemampuan media exposernya, betul – betul bingung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, kepada siapa menyampaikan kejanggalan – kejanggalan

pelaksanaan proyek di lingkungannya, dan tidak mengetahui melalui apa supaya aspirasinya sampai kepada pemerintahannya. Misalnya, masyarakat mengeluh tidak mengetahui kapan usulan pembangunan, atau survey yang telah dilakukan diwujudkan atau mengapa ia yang pengemis, pemulung yang miskin tidak mendapat bantuan dari proyek yang dijalankan pemerintah, sementara orang lebih mampu, tidak miskin menerima bantuan tersebut. (*informan, masyarakat umum, tahun 2020*).

ANALISIS

Komunikasi eksekutif, legislatif, maupun eksekutif – legislatif pada pemprov Kal sel, berlangsung secara formal.

Pada komunikasi semacam ini, terdapat hambatan struktur, yang juga menyebabkan terjadinya hambatan komunikasi. Komunikasi menjadi searah atau kaku – keharmonisan komunikasi tidak akan terjadi.

Di samping itu isi komunikasi hanyalah terdiri dari :

- Instruksi dan perintah untuk dikerjakan selalu dikomunikasikan ke bawah melalui rantai komando dari seseorang kepada orang yang berada di bawah hirarkinya langsung.
- Laporan, pertanyaan, permohonan selalu di komunikasikan ke atas melalui rantai komando dari seseorang kepada atasannya langsung. (*Miftah Thoha, 1988 : 183*).

Karena itu bagi kedua lembaga ini penyerapan aspirasi masyarakat, yang sementara ini belum mempunyai jaringan komunikasi yang mantap merupakan suatu kebutuhan yang mendesak.

Keberadaan jaringan komunikasi semacam itu akan sangat berguna dalam rangka mengedepankan peranan aspirasi masyarakat Kal Sel dalam proses pengambilan keputusan di eksekutif, khususnya bagi anggota dewan aspirasi tersebut merupakan bekal yang sangat berharga.

Selain melalui jaringan komunikasi sosial, proses penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi / komunikasi dapat pula dilakukan melalui media massa/online . Pemanfaatan media yang disebut terakhir ini oleh Pemprov maupun DPRD belum dilakukan secara maksimal. Pemanfaatannya secara maksimal, haruslah dimasukkan dalam perencanaan pembangunan pemprov secara komprehensif.

Akibat belum adanya perencanaan tersebut, tidak bisa didapatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak Pemprov dan DPRD Kal sel dengan media massa/online. Saat ini, kedua lembaga lebih memosisikan diri sebagai “ servicer “. Sementara wartawan / media massa/online pada posisi yang mendapatkan keuntungan.

Kekurangan lembaga eksekutif menjadi bertambah, ketika mereka tidak dapat memanfaatkan rubrik atau program yang disediakan media massa/online untuk menyerap aspirasi masyarakat, yakni : berperilaku “ ogah – ogahan “ dalam menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat.

REKOMENDASI

Bertitik tolak dari uraian – uraian sebelumnya, maka kiranya diperlukan langkah-langkah berikut :

- Pemahaman yang lebih mendalam dan luas tentang manajemen komunikasi / Humas, baik ditataran maupun legislatif. Misalnya : melalui suatu semiloka yang mengupas secara teoritis dan praktis apa itu manajemen komunikasi / Humas.
- Membangun suatu jaringan komunikasi / informasi eksekutif / legislatif ke masyarakat dan sebaliknya, untuk menjamin sampainya kebijakan eksekutif / legislatif ke masyarakat dan sampainya tanggapan terhadap kebijakan dan aspirasi masyarakat ke eksekutif / legislatif.

4	AI	Wiraswastawan	P
5	S	Jurnalis	P
6	W	Politisi Partai	P
7	MA	Pengamat Kom Pemerintahan	P

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelaahan penulis terhadap konten komunikasi pemerintahan melalui media online dan offline, didapatkan simpulan bahwa komunikasi melalui dua kelompok media ini, belum sepenuhnya relevansi dengan pemangku kepentingan masyarakat menengah kebawah, dan menunjukkan bentuk komunikasi yang terjadi bersifat *downward communication*. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah daerah melalui kedua media tersebut, belum responsif, transparan, akuntabel, dan terbuka.

Selain itu itu peneliti juga telah melakukan wawancara dengan 7 (tujuh) orang keys informan, yang mempunyai latar belakang beragam. Mereka itu mewakili akademisi, pedagang kaki lima, pengamat gender, pengusaha/penerbitan/kontraktor, wartawan, politisi partai, dan pengamat komunikasi pemerintahan. Data kualitatif yang diperoleh dari keys informan ini, disajikan dan dianalisis. Wawancara dilakukan dengan mereka untuk mendapatkan data atau informasi, terkait dengan efektivitas komunikasi pemerintahan yang dilancarkan oleh pemrov kal sel, baik melalui media offline maupun online kepada stakeholdernya.

Dari wawancara dengan informan (AI) seorang wiraswastawan didapatkan data atau informasi bahwa komunikasi pemerintahan yang dilancarkan pemrov kal sel, melalui dinas perindustrian dan perdagangan tentang bantuan modal kepada UKM dan pelatihan ternyata menurut pengakuan yang bersangkutan tidak mengetahuinya. Sedangkan informasi tentang

kebijakan pemprov yang tidak terkait dengan ekonomi, yakni tentang kelangkaan BBM dan listrik PLN yang byarpet, pernah terbaca di surat kabar, tapi informasinya kurang memuaskan, karena kebijakan tersebut tidak bisa direalisasikan di lapangan. Informan (AI) berkata,

Saya belum pernah tahu adanya pemberitaan atau informasi dari dinas diperindag kalsel tentang adanya bantuan modal untuk UKM dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas tersebut. Yang pernah saya baca di surat kabar adalah pemberitaan kebijakan pemprov kal sel tentang kelangkaan BBM dan listrik PLN yang byarpet. Tapi kurang puas, karena kebijakan tersebut tidak bisa direalisasikan di lapangan. Saya berpikir mungkin karena BBM dan PLN dikelola oleh BUMN.

Kebetulan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemberitaan yang terkait langsung dengan aktivitas sehari-hari (Kelangkaan BBM, Listrik Byarpet, kemacetan lalu lintas) dan yang terkait usahanya (modal, pelatihan, dan perbankan). Informasi semacam ini cenderung dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah. Entah kebetulan atau memang sengaja, pesan-pesan semacam itu, umumnya tidak dijelaskan secara tuntas. Salah seorang informan yang lain yakni (S) seorang jurnalis mengatakan hal tersebut,

Wartawan tidak bisa kritis, bisa bertanya tetapi tidak semuanya berkenan dijawab atau kalau dijawab juga tapi diminta jangan dimuat, misalnya anggaran yang ada dalam kebijakan, seperti program pemugaran rumah, tak pernah dikupas habis misalnya bagaimana pelaksanaannya, tanggung jawabnya efektif atau tidak dan sebagainya. Berita semacam ini dikatakan mereka sensitif, sebagai alasan pembenaran untuk mempersuasi wartawan agar mengikuti keinginan mereka.

Selain itu komunikasi pemerintahan yang dilancarkan oleh pemprov, disampaikan kepada sasaran yang kurang tepat, hal ini tercermin dari kurang relevannya antara materi yang disampaikan dengan yang diundang, serta pelaksanaan kegiatan. Materi yang didesiminasikan tentang pembelaan kepentingan perempuan tapi yang diundang adalah pejabat pemerintah, elite elite ormas dari atas sampai tingkat kelurahan dan desa. Sementara para perempuan di desa dan kelurahan tidak tersentuh oleh kegiatan tersebut. Salah seorang informan (SH) pengamat masalah gender mengemukakan pendapatnya,

Komunikasi Pemprov Kalimantan selatan menurut saya kurang responsif terhadap persoalan perempuan di Kal sel, hal ini terlihat dari KDRT yang terjadi terus meningkat. Pemprov mungkin mengakui komunikasi dan usaha mereka sudah maksimal, seperti edukasi melalui sosialisasi yang diberikan oleh dinas PPA, akan tetapi menurut saya edukasi itu tidak/belum bisa menyentuh masyarakat lapisan bawah, karena kegiatan tersebut diadakan di hotel berbintang dan dihadiri oleh perwakilan dinas-dinas, tokoh

tokoh masyarakat kelas atas yang belum juga pesan ini sampai ke masyarakat bawah melalui ormas yang hadir.

Kelemahan komunikasi pemerintah provinsi Kalimantan selatan, mungkin tidak terlepas dari kelemahan yang disinyalir dimiliki oleh pemerintah pusat. Pada suatu kesempatan juru bicara presiden Johan Budi dan Dirjen Informasi dan komunikasi Publik kementerian komunikasi dan informasi menyebut komunikasi pemerintah pusat belum terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Dalam forum Bakohumas tanggal 24 agustus 2019 di Jakarta Johan Budi selaku juru bicara presiden menyampaikan pernyataan bahwa “ cara pemerintah pusat dalam berkomunikasi kepada publik menjadi kritikan tajam akhir-akhir ini. Selain pernah terjadi pergaduhan antar Menteri dan pejabat negara diranah public, belakangan juga terjadi ketidakadilan informasi”. Sedangkan Dirjen informasi dan komunikasi public kementerian Kominfo, Niken Widiastuti menyebutkan bahwa “ persepsi public terhadap informasi dari pemerintah juga menjadi salahsatu masalah yang perlu segera ditindaklanjuti”.

Ditingkat pemerintah provinsi Kalimantan selatan kelemahan komunikasi publik ini juga disinyalir, tidak luput dari kebijakan dibidang humas yang tidak sepenuhnya mempercayai kemampuan lembaga yang ada, disamping kelemahan SDM yang tergabung dalam lembaga tersebut. Hal ini tercermin dari pandangan informan (MA) seorang pengamat komunikasi pemerintahan berikut ini,

Kebijakan Pemprov tidak bisa disampaikan dengan baik kepada stakeholder disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, kompetensi pegawai masih kurang, seperti dalam hal membuat dan menganalisis berita. Kedua, sikap pimpinan kurang mendukung kemampuan pengelolaan pemberitaan. Dalam artian, kurang difungsikan untuk menganalisis dan memberi tanggapan berita. Ketiga, koordinasi antar SKPD lemah. Keempat, irama kerjanya rutinitas. Dalam artian melanjutkan yang sudah dilakukan oleh pejabat dan staf humas sebelumnya. Kelima, manajemen Humas kurang jalan.

Hal yang sama tampaknya dirasakan oleh informan (S) seorang jurnalis yang melihat komunikasi pemerintahan Pemprov kalsel belum berjalan dengan baik, fungsi humas belum dipraktikkan secara utuh. Bahkan dari segi kelembagaan saja, belum memenuhi kapasitas yang layak, misalnya kelembagaan humas harus di level atas. Informan (S) mengemukakan opininya,

Komunikasi pemerintahan pemprov kalsel yang saat ini digawangi(oleh biro Adpim dan dinas kominfo) harusnya agresif, aktif ketika ada pemberitaan miring. Atau sigap ketika ada wartawan konfirmasi pemberitaan. Kegiatan Humas saat ini belum mencerminkan fungsi secara utuh. Maksudnya, fungsi kegiatan komunikasi pemerintahan itu bukan sekedar menyampaikan, melainkan juga mengelola berita. Antara lain mengkoordinir berita SKPD, mengolah dan menyampaikannya ke media/wartawan

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat dan cepat, diikuti juga oleh pemerintah provinsi Kalimantan selatan, dengan membangun sebuah website, yang diberi nama "Website Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan" dengan URL : <http://www.kalselprov.go.id/#> . Meskinnya website ini sangat strategis untuk menyampaikan komunikasi pemerintahan ke public, dan juga untuk menerima masukan serta aspirasi dari masyarakat. Fungsi strategis ini nampaknya belum bisa diraih sepenuhnya oleh lembaga pemerintahan ini. Informan (S) seorang jurnalis, mengomentari hal ini dan menilai website pemprov kal sel belum begitu fungsional. Dia menyatakan opininya sebagai berikut,

Keberadaan website pemprov terkesan datar, tidak diupload setiap hari (membuat wartawan malas membukanya), kurang familiar (tidak begitu dikenal), isinya umum (profil lembaga, pejabatnya, tidak ada tentang kebijakan, kurang tersedia mekanisme interaktif di dunia maya), tidak bisa minta tanggapan.

Dari uraian uraian di atas diperoleh gambaran komunikasi pemerintah provinsi kalimantan selatan saat ini belum begitu fungsional, jalan dengan banyak kelemahan, yang tentunya berdampak pada citra pemprov sendiri dan pelayanan komunikasi pemerintahan yang terbatas. Terkait yang disebut terakhir, informan (W) seorang politisi partai politik, mengemukakan pendapatnya,

Komunikasi pemprov ke media adalah pemberitaan pencapaian prestasi dan sosialisasi. Misal, gubernur bertemu dengan pejabat pusat di bandara (ini yang ditonjolkan), bukan follow upnya (apa yang diperoleh terkait dengan kebijakan tertentu). Begitu juga pemberitaan tentang reboisasi, kerusakan lingkungan, tidak ada pemberian HGU kelapa sawit, tidak pernah menjadi headline

Dari analisis di atas dapat dideteksi beberapa kekurangan komunikasi pemerintah provinsi Kalimantan selatan kepada stakeholdernya. Selama ini komunikasi pemerintahan pemprov cenderung *downward communication*, karena itu perlu dikoreksi dengan memulai

Maksudnya komunikasi dua arah. Sekarang ini sebetulnya lebih mudah untuk melakukannya, dengan adanya media sosial. Kemudian dikembangkan pula komunikasi pemerintahan melalui komunikasi sosial dengan sasaran publik tertentu. Salah seorang informan (SA) seorang akademisi menyarankan solusi untuk komunikasi pemerintahan Pemprov Kal sel yang lebih baik sebagai berikut,

Sosial media memiliki potensi yang cukup besar untuk turut berkontribusi dalam komunikasi publik pemerintahan. Sosial media memiliki kelebihan diantaranya memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Melalui sosial media masyarakat dapat langsung merespon informasi yang disebarkan oleh pemerintah. Penggunaan sosial media menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam membangun pola komunikasi publik pemerintah dan perubahan mindset strategi komunikasi di era digital saat ini, komunikasi publik pemerintah perlu beralih dari metode konvensional ke metode digital. Dan peningkatan komunikasi publik juga dilakukan melalui komunikasi sosial dengan ragam sosialisasi, aksi dan pelatihan secara berkesinambungan.

Berbeda dengan saran di atas (SH) pengamat masalah gender, melihat lebih efektif komunikasi pemerintahan dilancarkan diarahkan kepada masyarakat menengah kebawah sebagai dasarnya. Tidak diserahkan komunikasi tersebut kepada para elite yang di tatar di hotel berbintang, tetapi tidak dapat dipastikan mereka akan meneteskan pengetahuan yang diperolehnya ke bawah. Dengan mengambil contoh komunikasi pemerintahan tentang masalah gender dia mengatakan,

Untuk memastikan komunikasi sampai ke masyarakat kelas bawah, edukasi melalui sosialisasi jangan glamor dan gaungnya saja yang besar dilakukan di hotel hotel berbintang menghabiskan banyak uang, tapi pesan belum tentu sampai ke masyarakat kelas bawah. Jadi buat program yang benar benar menyentuh persoalan perempuan di masyarakat bawah.

Komunikasi Pemerintahan Partisipatif

Salah satu unsur penting dari good governance adalah transparansi yang hanya bisa dicapai melalui komunikasi pemerintahan partisipatif. Transparansi berarti memberi informasi secara benar, jujur dan adil; partisipatif berarti masyarakat diikutsertakan memberi informasi dalam membuat kebijakan dan berjalannya control sosial; Informasi-informasi yang penting dalam good governance ialah informasi sektor publik berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan,

ekonomi, dan administrasi; informasi sektor dunia usaha yang berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi; dan informasi sektor sosial yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak dijangkau oleh institusi public dan bisnis.

Ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi agar komunikasi pemerintah daerah sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatif. Sejalan dengan prasyarat itu, beberapa penulis telah menunjukkan pentingnya keterbukaan pemerintah untuk keterlibatan publik (Lee & Kwak, 2012), untuk menciptakan budaya transparansi (Bertot, JC, et al., 2010), transparansi dalam komunikasi pemerintah (Fairbanks, Ploughman, & Rawlins, 2007), dan keterlibatan politik media dan warga negara (Dahlgren, 2009). Tujuan transparansi yang lebih luas adalah untuk memastikan bahwa warga negara memahami bagaimana keputusan dibuat dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Cavoukian & Mitchinson 2003). Ada dua sisi dari kontroversi mengenai layanan komunikasi pemerintah, di era desentralisasi dan demokratisasi regional dalam konteks Kalimantan Selatan, yaitu; (1) menuntut agar pemerintah benar-benar memberikan layanan kepada masyarakat; (2) tuntutan keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam semua kebijakan publik. Ini benar benar diilustrasikan dalam hasil wawancara dengan pemangku kepentingan utama dari luar pemerintah.

Sistem komunikasi pemerintah daerah yang interaktif dan responsif di mana pejabat pemerintah selalu mengkomunikasikan kebijakan publik kepada publik dan di mana orang dengan mudah mengakses informasi dan memberikan umpan-balik tentang berbagai masalah yang mereka hadapi dan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kondisi ideal komunikasi pemerintah partisipatif seperti ini tampaknya masih terbatas pada harapan para pemangku kepentingan yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Studi ini menunjukkan hasil yang menginspirasi bahwa teknologi komunikasi melalui jaringan resmi pemerintah daerah sebenarnya dapat menjadi media komunikasi pemerintah yang efektif jika memfasilitasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini berhubungan dengan partisipasi dalam media dan melalui media. Partisipasi melalui media berfokus pada peluang untuk berpartisipasi dalam debat publik, dalam apa yang oleh sebagian orang disebut ruang publik, mengikuti pendekatan konsensus (dalam konsep Habermas, 1991) di mana setiap warga negara terlibat dalam proses demokrasi lokal.

Studi ini menunjukkan hal penting yang terjadi dalam transisi demokrasi di Indonesia pada abad ke-21 bahwa harapan publik terhadap praktik komunikasi pemerintah daerah telah berubah dari peran "pejabat" tradisional menjadi "mitra yang baik": merawat warga negara, memahami kebutuhan komunitas lokal, dan menawarkan solusi untuk masalah mereka. Inilah arti sebenarnya dari pendekatan komunikasi pemerintah partisipatif yang harus diadopsi oleh para pemimpin lokal dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia

KESIMPULAN

Studi ini benar-benar menemukan bahwa praktik dan kinerja komunikator pemerintah daerah di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan warga dan masyarakat dan tuntutan undang-undang di mana pemerintah diminta untuk mendengarkan aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat lokal.

Kesimpulannya, studi ini telah membantu para pemerhati untuk memahami bahwa kualitas komunikasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik manajemen maupun struktural. Meskipun faktor manajemen tetap penting, dalam kasus pemerintah daerah Kalimantan Selatan, faktor struktural lebih berpengaruh pada implementasi komunikasi pemerintah dalam layanan publik. Sementara komunikasi pemerintah belum melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal utama dan warga negara mereka, lebih banyak kepentingan elit atau kepentingan partai daripada kepentingan publik atau kepentingan warga negara. Para pejabat pemerintah daerah kurang responsif dan masih *downward communication*, sehingga ide-ide profesionalisasi komunikasi pemerintah daerah masih terbatas pada harapan daripada kenyataan.

Mungkin bijaksana bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan komunikasi pemerintah kepada warganya melalui berbagai saluran, formal dan informal. Pemegang jabatan perlu mengembangkan komunikasi pemerintah daerah yang dialogis dan transparan dengan keterlibatan aktif oleh warga dan untuk mengadopsi pendekatan komunikasi pemerintah yang partisipatif. Studi ini merekomendasikan bahwa komunikasi pemerintah daerah dapat efektif jika memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan warga negara dalam partisipasi untuk perencanaan komunikasi dan implementasinya termasuk suara dan perspektif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2002. Kebijakan Publik, Cetakan ketiga. Jakarta, Penerbit: Suara Bebas
- Abdullah, Aceng .2000. Press Relations. Bandung. Penerbit:PT Remaja Rosda
- Astuty, Sri.2017.Komunikasi Bencana, Kearifan Lokal, dan Pemberdayaan.Prosiding Aspikom.
Yogyakarta.Penerbit: Buku Litera
- Anderson, B. R. O'G. (1990). Language and power: Exploring political cultures in Indonesia.
Ithaca: Cornell University Press.
- Antlöv, H. (1995). Exemplary centre, administrative periphery: Rural leadership and the new
order in Java. Richmond: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (eds.) (2003). Local power and politics in Indonesia: Decentralisation
and democratization. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Aspinall & G. Fealy (eds.), Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and
democratisation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies/Leiden: KITLV.
- Aspinall, E. & Mietzner, M. (eds.). Problems of democratisation in Indonesia: Elections,
institutions and society. Singapore: ISEAS.
- Berlo, D.K. 1960. *The Process Communication*. New York: Holt, Rinehart, and Winston
- Bertot, J. C., et al. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and
social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government
Information Quarterly*, 27(3).
- Ember, B. (2001). Information and political engagement in America: The search for effects of
information technology at the individual level. *Political Research Quarterly*, 54(1), 53–
67.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2002. Kebijakan Publik, Cetakan ketiga. Jakarta, Penerbit: Suara Bebas
- Abdullah, Aceng .2000. Press Relations. Bandung. Penerbit:PT Remaja Rosda
- Astuty, Sri.2017.Komunikasi Bencana, Kearifan Lokal, dan Pemberdayaan.Prosiding Aspikom.
Yogyakarta.Penerbit: Buku Litera
- Anderson, B. R. O'G. (1990). Language and power: Exploring political cultures in Indonesia.
Ithaca: Cornell University Press.
- Antlöv, H. (1995). Exemplary centre, administrative periphery: Rural leadership and the new
order in Java. Richmond: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (eds.) (2003). Local power and politics in Indonesia: Decentralisation
and democratization. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Aspinall & G. Fealy (eds.), Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and
democratisation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies/Leiden: KITLV.
- Aspinall, E. & Mietzner, M. (eds.). Problems of democratisation in Indonesia: Elections,
institutions and society. Singapore: ISEAS.
- Berlo, D.K. 1960. *The Process Communication*. New York: Holt, Rinehart, and Winston
- Bertot, J. C., et al. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and
social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government
Information Quarterly*, 27(3).
- Ember, B. (2001). Information and political engagement in America: The search for effects of
information technology at the individual level. *Political Research Quarterly*, 54(1), 53–
67.

- Lehler, M. (2012). Revisiting the inclusion-moderation thesis in the context of decentralized institutions: The behavior of Indonesia's Prosperous Justice Party in national and local politics. *Party Politics*, 19(2).
- Lehler, M., & Tan, P. J. (2007). Party-candidate relationships in Indonesian local politics: A case study of the 2005 regional elections in Gowa, South Sulawesi province. *Indonesia*, 84.
- Monte, M. & Ufen, A. (eds.) (2009). *Democratization in post-Suharto Indonesia*. Oxon & New York: Routledge.
- Canel, M. J. & Sanders, K. (2010). Crisis communication and terrorist attacks: Framing a response to the 2004 Madrid bombings and 2005 London bombings. In Coombs, W. T. & Holladay, S. J. (eds), *Handbook of crisis communication*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Canel, M. J. & Sanders, K. (2013). Introduction: Mapping the field of government communication. In Sanders, K. & Canel, M. J. (eds.), *Government communication: Cases and challenges*. London: Bloomsbury.
- Canel, M. J. & Sanders, K. (2012). Government communication: An emerging field in political communication research. In Semetko, H. A. & Scammell, M. (eds.) *The Sage handbook of political communication*. London: Sage.
- Canel, M. J. & Sanders, K. (2014). Is it enough to be strategic? Comparing and defining professional government communication across disciplinary fields and between countries. In Canel, M. J. & Voltmer, K. (eds.), *Comparing political communication across time and space: New studies in an emerging field*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Canel, M. J., & Sanders, K. (2011). Government Communication. In *International Encyclopedia of Communication Online*, Wiley Blackwell.